# ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama NU Mengenai Wali *Muḥakkam* Atas Dasar Wali '*Aḍal*." Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian., yaitu bagaimanakah pandangan ulama NU mengenai wali *muḥakkam* atas dasar wali '*aḍal* ? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan ulama NU mengenai wali *muḥakkam* atas dasar wali '*aḍal* ?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang juga merupakan penelitian kepustakaan sehingga sumber utamanya adalah literatur-literatur yang terkait dengan wali *muḥakkam* atas dasar wali '*aḍal* dalam perkawinan baik dalam perspektif hukum Islam dan pandangan ulama NU maupun literatur yang relefan terkait kasus-kasus perwalian dalam nikah. Teknik analisa data penelitian ini menggunakan telnik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya yang dalam hal ini data tentang pandangan ulama NU terhadap wali *muḥakkam,* kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum fikih khususnya tentang wali dalam nikah. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel data yang bersifat umum, dalam hal ini teori hukum Islam tentang wali nikah kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah pandangan ulama NU.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dengan wali *muḥakkam* terjadi karena calon suami istri terhalang menikah dengan landasan wali nasab enggan ('*aḍal*), tetapi tidak mau berurusan dengan wali hakim dan ingin mengambil jalan mudah dalam melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat pandangan ulama terkait pernikahan dengan wali *muḥakkam,* ada yang menghukumi pernikahan ini tidak sah karena masih ada wali hakim yang berwenang, dan pernikahan demikian menimbulkan banyak kerugian terutama bagi istri karena ketiadaan kekuatan hukum (buku nikah), kesulitan dalam menuntut hak istri dan anak serta bagi anak karena akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran. Dan ada juga yang menghukumi pernikahannya sah dengan alasan keadaan darurat.

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah seharusnya pasangan calon mempelai yang ingin menikah harus patuh dan taat dengan hukum Negara yang belaku, jangan melakukan pernikahan dengan menggunakan wali *muḥakkam* yang mana status hukum keabsahan nikahnya masih belum jelas. Selain itu para pemuka agama harus berusaha untuk keluar dari melakukan hal-hal yang bersifat ikhtilaf (*muḥakkam*) supaya perbuatannya tidak menjadi kontroversial dan sorotan, karena sudah ada ketentuan hukum yang mengatur masalah ini dalam perundangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id